

**SINKRONISASI PELAKSANAAN DIVERSI MENGENAI PERSYARATAN
DIVERSI DALAM UU NO. 11 TAHUN 2012 DAN PERATURAN PELAKSANAAN
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
SKRIPSI**



Oleh :
MASDEN KAHFI
NIM. 115010107111185

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv
Ringkasan	vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak	10
B. Tinjauan Umum Tentang Diversi	12
C. Tinjauan Umum Tentang SPP di Indonesia.....	14
D. Tinjauan Umum Tentang SPP Anak.....	19
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Khusus.....	21
F. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak dalam SPPA.....	24

BAB III METODE PENELITIAN 25

A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	28
F. Definisi Konseptual	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 30

A. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	30
1. Tujuan Peradilan Pidana Anak	38
B. Persyaratan Diversi dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012	49
C. Persyaratan Diversi dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014	58
D. Pengaturan yang Terkait dengan Persyaratan Diversi dalam	

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	60
1. Hukum Perlindungan Anak	60
2. Hukum Kesejahteraan Anak	63

BAB V PENUTUP	68
----------------------------	-----------

1. Kesimpulan	67
2. Saran	68

Daftar Pustaka	69
-----------------------------	-----------



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah anugerah yang diberikan dan dititipkan oleh Tuhan pada setiap insan manusia, anak juga merupakan bagian dari warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa berikutnya. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.¹

Hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak yaitu untuk memperoleh perlindungan baik dari orang tua, masyarakat, dan negara. Hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan yang terjamin, dan kesejahteraan merupakan sebagian dari hak-hak anak yang harus terpenuhi. Jaminan perlindungan hak anak tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.²

Mengingat ketentuan yang ada dalam UUD 1945, anak memiliki sifat-sifat khusus yang berbanding terbalik dengan orang dewasa. Oleh sebab itu pemerintah telah merespon dengan memberikan pengaturan yang khusus terkait dengan sistem peradilan pidana anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pelaksananya seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Dengan diundangkannya peraturan tersebut merupakan langkah atau upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak yang melekat pada anak, karena seiring perkembangan dan dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara

¹Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: UPN, 2006, hlm. 2.

²Irsan Koesparmono, *ibid*, hlm. 20.

sering dijumpai penyimpangan perilaku yang terjadi dikalangan anak itu sendiri.

Bahkan sering terjadi anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Sehingga dari penyimpangan perilaku anak tersebut menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.

Dalam proses peradilan bagi anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai bahasan sistem peradilan pidana anak.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.11 Tahun 2012 Sistem peradilan pidana anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum, mulai proses penyelidikan sampai dengan proses pembinaan setelah menjalani pidana.”(Pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012)

Indonesia mengkhususkan proses peradilan bagi anak daripada proses peradilan pada umumnya, menangani anak yang berkonflik dengan hukum, seorang hakim senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana justru akan menyebabkan anak menjadi trauma dan bahkan dapat menyebabkan anak lebih profesional dalam melakukan kembali kejahatan.

Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak itu sendiri, sebelum pengaturan terkait sistem peradilan pidana anak diundangkan negara telah mengupayakan untuk memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan sistem peradilan “anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.”³

Upaya mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana, sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Guna menghindari efek negatif dari serangkaian sistem peradilan pidana terhadap anak, maka aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk mengupayakan menyelesaikan perkara pidana anak, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. penyelesaian perkara pidana anak yang keluar dari proses peradilan pidana pada umumnya disebut Diversi. Didalam pengaturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012, diversi harus memandang keadilan restoratif yang telah diterangkan bahwa “ penyelesaian perkara pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak yang terkait untuk bekerja bersama mencari jalan keluar yang adil

³Setya Wahyudi, 2011, **Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia**, Cet. Ke 1 , Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

dengan memfokuskan untuk pemulihan kembali pada keadaan awal, dan bukan pembalasan.”(Pasal 1 angka 6 UU SPPA)

Diversi merupakan hal mutlak yang wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, terkait hal itu sesuai dengan Pasal 95 UU SPPA memberikan sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar untuk mengupayakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Diversi sendiri memiliki tujuan:⁴

- a. “Mencapai perdamaian antara korban dan anak”;
- b. “Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan”;
- c. “Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan”;
- d. “Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi”;
- e. “Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”.

Pembedaan perlakuan dan ancaman dalam kehidupan sosial tidak mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ini khususnya UU No 11 Tahun 2012 dan Perma No 4 Tahun 2014 dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Karena kembali pada tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri dan keluarga. Diversi memang diperuntukkan untuk anak tapi tidak semua anak dapat diupayakan untuk diversi, karena diversi memiliki

⁴Pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

syarat-syarat seperti yang telah tertulis dan diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 7 (2) yaitu:

(2) Diversi sesuai apa yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:⁵

a. “Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”; dan

b. “Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Selain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang mengatur tentang pelaksanaan diversi, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan diversi itu sendiri yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi sistem peradilan pidana anak. Dalam Peraturan Mahkamah Agung mengatur tata cara dan proses pelaksanaan diversi, salah satunya mengenai persyaratan diversi seperti yang tertuang dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang berbunyi “Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa telah melakukan tindak pidana dengan sanksi pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).”⁶

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul:

**“SINKRONISASI PELAKSANAAN DIVERSI MENGENAI
PERSYARATAN DIVERSI DALAM UU NO. 11 TAHUN 2012 DAN
PERATURAN PELAKSANAANYA TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DI INDONESIA”**

⁵Pasal 7 (2) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶Pasal 3 PerMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak



B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah persyaratan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 telah sinkron?
2. Apakah pengaturan persyaratan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pelaksananya telah mengedepankan prinsip perlindungan anak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Undang-Undang manakah yang lebih diberlakukan dan lebih tepat digunakan terkait persyaratan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seiring dengan munculnya pertentangan diantara kedua Undang-Undang yang mengaturnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bilamana jika ketentuan persyaratan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak dan peraturan pelaksanaanya telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak tidak.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai masukan dalam kajian ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan ketentuan persyaratan diversi dalam sistem peradilan anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Universitas

Penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan hukum bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya di lingkungan Universitas Brawijaya

Malang, tentang ketentuan persyaratan diversi dalam sistem peradilan anak.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur sejauh mana mengembangkan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan ketentuan persyaratan diversi dalam sistem peradilan anak.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam sistem pemerintahan terkait dengan ketentuan persyaratan diversi dalam sistem peradilan anak.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang ketentuan persyaratan diversi dalam sistem peradilan anak. Sehingga masyarakat mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam proses diversi pada sistem peradilan anak.

e. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum terkait dengan ketentuan persyaratan diversi dalam sistem peradilan anak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab secara rinci dan sistematis dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bagian pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Menguraikan landasan teori-teori serta pendalaman pengertian tiap kata mengenai masalah-masalah yang akan dibahas dan dianalisa oleh penulis meliputi yang menjadi rumusan masalah tentang ketentuan persyaratan diversi dalam sistem peradilan anak.

Menguraikan secara runtut mengenai:

1. Tinjauan umum tentang Pengertian Anak

- Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

2. Tinjauan umum tentang Pengertian Diversi

- Pengertian diversi
- Tujuan diversi

3. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Sejarah dan arti Sistem Peradilan Pidana Anak
- Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Tinjauan Tindak Pidana Khusus

- Macam-macam tindak pidana khusus
- Unsur-unsur dalam tindak pidana
- Azas-azas dalam peradilan anak

5. Tinjauan tentang Perlindungan Anak terkait Sistem Peradilan Pidana Anak

Bab III : Metode Penelitian

Bagian ini memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Mengkaji dan menguraikan hasil penelitian yang relevan dan pembahasan dari masalah yang diteliti oleh penulis dari permasalahan mengenai ketentuan persyaratan diversi terkait perbedaan pengaturan didalam pasal-pasal tersebut dalam sistem peradilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

Bab V : Penutup

Membahas dan mengemukakan kesimpulan berdasarkan dari urutan-urutan dan hasil dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah agar memberikan manfaat dan dapat dijadikan referensi atau wawasan bagi pihak yang berkepentingan dan membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian tentang Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat tersendiri. Oleh sebab itu anak perlu mendapat perlindungan sebagai upaya menjamin perkembangan dan pertumbuhan mental, fisik dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang. Dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak. (Selanjutnya disingkat dengan UU Pengadilan Anak) Ketentuan pasal 1 butir 1, pasal 2 butir 2a dan 2b mengatur secara jelas kedudukan dan status anak yang menyebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.¹

2. Pasal 1 angka 2a UU Pengadilan Anak

a. Anak yang melakukan tindak pidana atau

b. Anak melakukan perilaku dan sikap yang secara tegas terlarang untuk anak, berdasarkan peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

¹Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 16

Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap perlindungan hak-hak anak, karena secara hakekat terdapat substansi yang kurang (lemah) dan di dalam peradilan hukum Indonesia dipandang sebagai subyek hukum yang di tanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana telah sesuai dengan seorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak menurut perspektif hukum pidana dapat memberikan aspek hukum positif terhadap proses untuk mengembalikan anak dari perilaku menyimpang (Kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk fisik dan mental serta tanggungjawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.

UU Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak diterangkan bahwa Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Batas umur anak memberikan penggolongan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas umur anak adalah pengelompokan umur maksimal sebagai bentuk kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi umur dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Batas umur anak dalam pengertian hukum pidana diuraikan secara jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak pada pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.

Anak dalam pemaknaan yang luas mendapat perhatian tidak saja dalam bidang sosiologi, tetapi dapat dilihat dari sisi pandang sentralistik kehidupan agama, hukum dan ilmu pengetahuan yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan faktual dalam lingkungan bermasyarakat, karena anak merupakan suatu pemberian dari Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal.

B. Pengertian Diversi

Secara gramatikal bahasa, diversi adalah pengalihan, dimana pelaksanaan diversi yang bertujuan untuk menghindari anak dari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak terkait dengan terlibatnya dalam sistem peradilan pidana.

Diversi adalah “sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.”²

Diversi sendiri memiliki beberapa pengertian, diantaranya diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses diluar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat.

Restorative Justice adalah Penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.³

Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah “segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak”. Pertama, polisi sebagai lembaga formal ketika anak nakal

²[http:// doktormarlina.htm](http://doktormarlina.htm) Marlina, **Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**, Diakses hari sabtu tanggal 22 November 2014 pukul 15.00 WIB.

³Ibid hal, 180

pertama kali berhadapan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan masa depan anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Tahap kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat sebagai pihak yang turut berperan untuk menentukan kemanakah masa depan anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, proses saat anak hendak ditempatkan dalam suatu pilihan, mulai dari pembebasan sampai pemutusan untuk dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa “criminal justice system memiliki tujuan untuk” : (i) “resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana”; (ii) “pemberantasan kejahatan”; (iii) dan “untuk mencapai kesejahteraan sosial”. Dari penjelasan ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak lebih difokuskan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Akan tetapi terdapat usaha lain diluar sistem pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya upaya tahap Diversi dan Restorative Justice. Diversi adalah pengalihan untuk menangani perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari tahapan formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Dapat diterangkan yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :

- Agar anak terhindar dari penahanan;
- Agar anak tidak terdoktrin sebagai penjahat;
- Agar anak tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan;
- Memberikan anak rasa bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Untuk memberikan proses-proses baru yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal

- f. Agar anak terhindar dari proses sistem peradilan;
- g. Untuk menjauhkan anak dari dampak negatif dari proses peradilan.

Proses diversi dapat menjadi suatu keadilan restoratif jika :

- a. Melatih anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b. Memberikan kesempatan untuk anak sebagai korban kesalahan yang dilakukan untuk ikut serta dalam proses;
- c. Kesempatan diberikan kepada anak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- d. Sebagai upaya membangun kembali dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

C. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Indonesia merupakan suatu kemajuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan menempatkan bangsa ini sebagai negara hukum yang modern, karena dianggap telah mampu memberikan dukungan dengan kontribusi dari hadirnya KUHAP yang modern hingga sekarang.

Keberadaan KUHAP dianggap telah mengisi dan membantu proses yang nyata dalam menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih kolonial, meskipun telah diperbarui secara sebagian dan sesuai dengan kebutuhan suasana dalam negeri itu sendiri. Seringkali ditemukan kritikan-kritikan terkait penegakan hukum yang masih belum menampakkan ketaatan pada KUHAP, sebagai penyempurna Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang saling terkait dan berkolerasi dengan pembaruan KUHAP.

Berkaitan dengan hukum acara pidana, selalu berkaitan dengan sistem peradilan pidana serta sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara dan setiap pemerintahan di dunia ini pasti memiliki sistem peradilan pidana, meski terkadang secara umum hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri, yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut. Secara sederhana sistem peradilan pidana dapat dikatakan sebagai suatu proses yang dilakukan pemerintah atau negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Sistem peradilan pidana tidak hanya mencakup satu institusi saja, tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara. Sehingga aparat penegak hukum yang satu dan yang lainnya saling terkait. Para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah terpadu dan tidak dapat dipisahkan.⁴

Istilah sistem peradilan pidana atau "*criminal justice system*" menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan suatu kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, sebagai suatu sistem hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, atau juga merupakan setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada ketentuan pidana yang dikenakan kepadanya. Sehingga sistem peradilan pidana adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi atau lembaga yang terlibat dalam suatu proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana juga dapat digunakan sebagai alat pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan Terpidana. Atau

⁴Eddy OS. Hiarieji. *Beberapa Catatan RUU KUHP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional. (Jakarta; Komisi Hukum Nasional RI, 2013) hlm. 78-79

juga sering dikenal sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dalam artian pengendalian kejahatan, agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵

Dalam praktiknya hukum pidana pasti sangat memerlukan suatu proses peradilan, mulai dari proses penyidik oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan pengadilan oleh hakim. Tugas penyidik untuk melakukan seluruh rangkaian sebagaimana dengan kewenangannya dalam kasus, yang terjadi atas dasar laporan masyarakat, pengaduan korban atau masyarakat yang berhak mengadu, atau diketahui sendiri oleh penyidik. Penyidik yang memulai tugasnya mengerti benar atas dugaan, telah terjadi tindak pidana, dan harus mempunyai pengetahuan mendasar adanya dugaan tindak pidana, terhadap rumusan delik dalam undang-undang.⁶

Dalam praktik peradilan yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat bukti, dan masalah penerapan beban pembuktian dalam hukum acaranya. Masih terdapat pelanggaran atau tindakan menyimpang dari hukum yang ada didalamnya. Hukum semestinya harus ditegakkan, untuk mendapat kepastian dan keadilan. Adanya keharusan keseimbangan antara kepastian dan keadilan, mendekatkan keadilan dalam masyarakat.

Peranan hukun dalam mengatasi perkembangan zaman dalam era global ini, sejak lama dilakukan, dan salah satunya adalah melalui pembaruan hukum pidana nasional. Sampai pada saat ini, KUHAP yang dianggap sebagai aturan tertulis dalam pembaruan hukum acara pidana, dari peninggalan hukum acara

⁵Romli Atmasasmita. **Sistem Peradilan Pidana kontemporer**. (Jakarta; Kencana Prenada Group, 2011) hlm. 2-3.

⁶Sirande Palayukan. **Hukum Yang Hidup “ the living law “ dalam RUU KUHP. Dalam Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional**. (Jakarta; KHN RI, 2013) hlm. 6.

pidana belanda yang diadopsi Indonesia, dianggap tidak sesuai lagi, dengan dasar-dasar negara Indonesia, sehingga seiring dengan perkembangan gagasan kearah hukum acara pidana yang rasional.⁷

Pembaharuan hukum pidana, menuntut untuk memberikan pemikiran terhadap segala masalah yang ada, termasuk dalam masalah kebijakan dalam menentukan sanksi pidana. Dalam proses penyelesaian perkara pidana, sesuai dengan keadaan nyatanya dilakukan secara konvensional melalui proses dan mekanisme peradilan pidana. Apapun kenyataan sanksi pidana yang ditawarkan dan yang diterapkan, tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sistem peradilan pidana.

Sistem hukum Indonesia merupakan peninggalan masa penjajahan belanda dan menganut sistem hukum Eropa daratan (civil law system). Dalam sistem hukum Eropa yang dikembangkan adalah kaidah hukum secara sistematis dan berpedoman dengan undang-undang yang berlaku. Sistem penyelesaian sengketa di Indonesia bersifat litigasi berada dalam lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sebagai pedoman hukum bagi bangsa Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia memiliki konsep suatu negara hukum yang harus menjaga perilaku masyarakatnya, pemerintah, aparat penegak hukum,

⁷R.M. Haka Astana M. Widya. **Pra Peradilan dan Hakim Komisaris. Dalam Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.** (Jakarta; KHN RI, 2013) hlm. 30.

ataupun lembaga-lembaga lainnya selalu berdasarkan aturan hukum positif (berlaku).

Sistem peradilan pidana merupakan pemakaian pendekatan administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem ini mengandung implikasi suatu proses interaksi, yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien, untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁸

Sistem peradilan merupakan sistem penegakan hukum, secara integral dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum, “struktur hukum dan budaya hukum”. Sebagai suatu sistem penegakan hukum dalam mencari keadilan tidak terlepas dari tiga komponen yaitu “norma hukum atau peraturan perundang-undangan, lembaga, struktur, aparat penegak hukum dan nilai-nilai budaya hukum”. Dimaksud dengan nilai-nilai “budaya hukum” dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih berfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran atau sikap perilaku hukum atau perilaku sosial, dan pendidikan ilmu hukum.⁹

Pada dasarnya terdapat kesinambungan anatara tujuan, sifat, dan asas-asas hukum acara pidana. Asas-asas umum hukum acara pidana dan perundang-undangan terkait lainnya, yakni :

⁸ Anthon F Susanto. *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. (Bandung; PT. Refika Aditama, 2004) Hlm. 74

⁹ Barda Nawawi Arief. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia. (Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009) hlm. 181-183.

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. Asas Praduga tidak bersalah
3. Asas Peradilan Cepat, Sedrehana dan Biaya Ringan
4. Asas Hak Ingkar
5. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum
6. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Kehadiran Terdakwa
7. Asas Equality Before The Law
8. Asas Bantuan Hukum
9. Asas Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan
10. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi
11. Asas Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan
12. Asas Kepastian dan Jangka Waktu Penahanan.¹⁰

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana (SPP) untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam “*criminal justice science*” di Amerika Serikat sejalan dengan ketidak puasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum. Ketidak puasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah “hukum dan ktertiban (*lawand order approach*)” dan penegakan hukum dalam konteks

¹⁰Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm 66.

pendekatan tersebut dikenal dengan istilah *law enforcement*.¹¹ Ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan)
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
3. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "*the administration of justice*".¹²

Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya merupakan suatu proses kegiatan yang bersifat sistemik. Sistem berasal dari istilah Yunani *Systema* yang artinya suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (*interrelated*) satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks.¹³

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah pengendalian kejahatan

¹¹Romli Atamsasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Ablosionisme*, Cetakan Kedua, Binacipta, Bandung, 1996, hlm.7.

¹²Ibid, hlm. 10

¹³Wagino Ismail, *Pendekatan Sistem dalam Manajemen Organisasi*, Lembaga Penerbit UI, Jakarta 1984, hlm. 5

yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.¹⁴

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁵

Peradilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang, oleh karenanya ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak dilakukan secara khusus.¹⁶ Beberapa alasan-alasan yang disampaikan di atas dapat dikatakan merupakan sebagian dari dasar filosofis yang menjadi alasan mengapa seorang anak yang sudah melakukan perbuatan melanggar hukum masih perlu mendapatkan perlindungan. Peradilan anak difungsikan sebagai sarana kontrol tingkah laku anak, agar kenakalan yang dilakukan oleh anak tidak terjadi secara berkelanjutan dan mudah ditangani untuk tidak menjadi tindak kriminal.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)**, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 1999, hlm. 1.

¹⁵ Romli Atmasasmita, Op. Cit, hlm. 15

¹⁶ Bambang Wahyu, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.102.

E. Tinjauan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus ini dikategorikan tindak pidana yang sifatnya tidak di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun ada aturan tersendiri yang mengatur di dalam tindak pidana tersebut. Tindak pidana khusus ini meliputi antara lain :

- 1) Terorisme.
- 2) Narkotika dan psykotropika.
- 3) Korupsi.
- 4) Perlindungan Anak.
- 5) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- 6) Militer.
- 7) Money laundry.
- 8) Ham.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana di Indonesia menurut Simons antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia.
 - b. Diancam dengan pidana.
 - c. Melawan hukum.
 - d. Dilakukan dengan kesalahan.
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
- d. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana terdiri dari beberapa asas yaitu sebagai berikut :

Penafsiran peraturan-peraturan pidana itu hanya berdasarkan arti kata-kata, yang terdapat di dalam aturan pidana itu saja. Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan. Hukuman pidana menjatuhkan sanksinya, yaitu hukuman jika di langgar. Yang dapat di hukum hanya orang biasa saja, sedangkan badan hukum tidak Asas Teritoraliteit yaitu orang baik orang Indonesia, maupun orang asing yang telah melakukan kejahatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, di adili oleh hakim Indonesia, di dalam asas ini orang menitik beratkan pada dimana tindak pidana itu telah dilakukan.

Asas Personaliteit aktif yaitu setiap orang Indonesia, baik ia ada di Indonesia, ataupun di luar Indonesia, di kenakan hukum pidana Indonesia, di mana saja ia melakukan kejahatan. Asas Personaliteit pasif yaitu hukum pidana itu berlaku di mana saja dan terhadap siapa saja, jika kepentingan-kepentingan nasional tertentu di langgar atau di nodai. Asas Universaliteit yaitu tiap-tiap Negara dengan hukum pidananya berkewajiban untuk menjaga dan memelihara jangan sampai ketertiban di seluruh dunia itu dilanggar. Tindak pidana anak termasuk tindak pidana khusus, karena terdapat aturan tersendiri yang mengaturnya.

2. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Terdapat asas yang terkandung dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, asas-asas tersebut yang terkandung di dalam yaitu :¹⁷

- a. Asas perlindungan;
- b. Asas keadilan;
- c. Nondiskriminasi;

¹⁷ Pasal 2 UU No.11 tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**

- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

F. Tinjauan tentang Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan segala pertimbangan berbagai aspek. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak secara umum dikatakan, “Anak adalah amanah sekaligus anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat hak-hak, harkat, dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.”(UU No.23 Tahun 2002)

Pasal 3 menjelaskan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berpartisipasi, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari perbedaan dan kekerasan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera” (UU-No. 23 Tahun 2002).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap hasil berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Penelitian adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan.¹ Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian.

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten”.

Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.² Dengan upaya mendapatkan dan mengumpulkan data dari kegiatan penelitian, digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep logis positif yang menyatakan bahwa “hukum adalah identik dengan norma-norma atau aturan tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga mengartikan hukum sebagai

¹WJS. Purwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal.39

²Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 42

sistem normatif yang bersifat tertutup, otonom, dan terlepas dari kehidupan masyarakat.³

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

C. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dibutuhkan dalam penulisan yaitu :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hukum peradilan anak sesuai dengan permasalahan yaitu:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 (LNRI Tahun 2012 Nomor 153, TLNRI Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak

³Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.

d) Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 109), tentang Perlindungan Anak;

e) Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979;

f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, pasal 3.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang diambil dari pendapat ilmiah para tokoh, para akademisi dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan sistem peradilan anak. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi:

- a. Buku-buku hasil penelitian
- b. Pendapat dan doktrin dari ahli hukum
- c. Literatur terkait
- d. Artikel internet

3. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan sistem peradilan anak yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), berarti metode yang melakukan pengumpulan bahan hukum terkait dengan permasalahan penelitian yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didapat dengan cara mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapat dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, artikel, dokumen, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, ditulis kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, dicatat kemudian dipelajari dan dimengerti artinya.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis dalam aturan tersebut, didalam penafsiran ini peneliti berupaya untuk menerapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan pengertian yang dimaksud oleh aturan tersebut yang ditujukan terhadap perundanga-undangan terkait yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai bahasan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan beberapa Undang-undang terkait didalamnya.

Dalam arti keseluruhan data yang didapat kemudian dikaitkan antara satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang

utuh. Kemudian ditarik kesimpulan, kesimpulan yang diambil ini dengan menggunakan cara pola pikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir dengan dilatarbelakangi oleh hal-hal yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

F. Definisi Konseptual

1. Persyaratan

Segala sesuatu yang harus terpenuhi dan harus ada demi tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki.

2. Diversi

Suatu proses dalam sistem peradilan pidana anak untuk mengalihkan penyelesaian kasus pidana yang terjadi pada anak, dari sistem peradilan pidana ke sistem di luar peradilan pidana.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Suatu rangkaian proses yang saling terkait antara satu proses dengan proses lainnya yang ditujukan terhadap anak yang membuat dan membawa dirinya dari status tersangka, terdakwa, hingga menjadi seorang terpidana.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) Indonesia pada hakikatnya serupa dengan Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) pada umumnya. Apabila memperdebatkan konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia maka sifatnya integral, menyatu dan saling terhubung dengan sistem peradilan pidana yang berlaku dan digunakan di Indonesia ini, meskipun terlihat memiliki beberapa kemiripan sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana memiliki perbedaan. Terlepas dari hal itu, dasarnya sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hukum dan aturan-aturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Peraturan ini juga dibuat sebagai penyempurna Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini maka Undang-Undang Tahun 1997 tidak lagi berlaku karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat akan aturan mengenai perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 atau disingkat UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum

dikatakan, “anak adalah organ penting dan tak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara dan keberlangsungan hidup manusia”.

Salah satu tujuan dari keluarnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri dari dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi dibidang teknologi dan komunikasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua yang memberikan dampak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap sikap dan perkembangan anak. Penyimpangan perilaku anak atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh faktor ekstern anak tersebut. Sesuai fakta anak yang berkonflik dengan hukum dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan mulai dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.¹

Prinsip perlindungan hukum mengenai anak harus didasari dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), dan kemudian Indonesia meratifikasinya dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengenai sub bahasan Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Dengan demikian jika penanganan perkara anak mengedepankan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-hak anak, maka dapat melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat memperoleh masa depan yang cerah serta memberi kesempatan

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

kepada anak melalui pembinaan untuk menyadarkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah dan menyimpang. Akan tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan perkara anak sering diposisikan sebagai obyek kasus sehingga perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dianggap tidak adil dan merugikan anak. “Maka dari itu perlu dilakukan perubahan mendasar dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain harus didasari pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.”²

Penyusunan undang-undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak (LN Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, TLN Republik Indonesia Nomor 3668) “yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat terpenuhinya peradilan yang sesuai dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa”. Undang-undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur tertulis pada Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan umum, dan oleh sebuah Mahkamah

²Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Konstitusi, namun undang-undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.”³

Substansi pengaturan dalam undang-undang ini, antara lain, mengenai penempatan anak yang sedang menjalani proses peradilan untuk ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini menggunakan dasar substansi adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan sehingga stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak muncul dan anak dapat kembali dalam lingkungan sosial yang wajar. Semua proses dalam undang-undang ini bertujuan untuk terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak dan korban, Keadilan Restoratif merupakan suatu poses diversi, yaitu “semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu untuk bekerja secara kelompok untuk mengatasi masalah serta mempunyai suatu kewajiban untuk memberikan dampak yang lebih baik dengan melibatkan anak, korban, dan masyarakat dalam mencari alternatif untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan”. Pengaturan khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umurnya, yaitu “untuk anak yang masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan untuk anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dikenai tindakan dan pidana.”⁴

Anak memiliki sifat dan ciri yang khusus dan demi perlindungan terhadap anak, kasus perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus disidangkan di

³Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

⁴Ibid.

pengadilan anak yang berada didalam lingkup peradilan umum. Sistem peradilan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sejak penangkapan, penahanan, dan diadili pembinaannya harus dilakukan oleh pejabat bersertifikat anak dan yang memahami tentang anak. Akan tetapi, sebelum ditindak dalam suatu sistem peradilan, para aparat hukum, masyarakat, dan keluarga harus terlebih dahulu mengupayakan sistem penyelesaian diluar jalur pengadilan, yaitu melalui diversi berlandaskan dengan Keadilan Restoratif. Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur tentang “keseluruhan proses penyelesaian kasus tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum mulai proses penyelidikan sampai dengan proses pembimbingan setelah menjalani pidana.”⁵

Agung wahyono, mensitasi pendapat Soedarto, menulis bahwa: Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan, pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak yang ruang lingkupnya meliputi:

1. Segala aktivitas pemeriksaan;
2. Pemutusan perkara; dan
3. Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak agar dipersingkat.⁶

Adapun dari beberapa ahli memberikan uraiannya yang berkaitan dengan usia anak, sehingga dapat membantu para hakim untuk menentukan putusannya agar putusan tersebut tidak merugikan perkembangan jiwa dan masa depan anak.

Menurut Kartono, menulis: “usia 1-5 tahun, anak dilahirkan dalam kondisi serba kurang lengkap; sebab semua naluri, fungsi jasmaniah, serta

⁵Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**.

⁶Agung Wahyono, **Tinjauan tentang Peradilan Anak Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1986, hlm. 7.

rohaninya, belum berkembang dengan sempurna.⁷ Selanjutnya, dihalaman yang lain ia menulis: “anak-anak usia 1-5 tahun, masih berada dalam status egosentris, artinya paham yang mementingkan diri sendiri. Seorang anak yang egosentris memandang dunia luar dari pandangan sendiri, sesuai dengan pengertian sendiri; dibatasi oleh perasaan dan pikiran yang masih sempit. Ia akan sangat terpengaruh oleh akal budinya yang masih primitif dan sederhana sehingga ia tidak mampu menyalami perasaan dan pikiran orang lain. Ia belum mampu memahami arti sebenarnya dari satu peristiwa, dan belum mampu pula menempatkan diri kedalam kehidupan batiniah orang lain. Secara tidak sadar menganggap dirinya sebagai pusat dari dunia ini.”⁸

Berkaitan dengan masa perkembangan jiwa ini, F.J Monks dkk menggolongkan usia remaja sebagai berikut:

- a) Pra remaja (pra pubetas) usia 10-12 tahun;
- b) Remaja awal (pubertas) usia 12-15 tahun;
- c) Remaja pertengahan usia 15-18 tahun;
- d) Remaja akhir usia 18-21 tahun.⁹

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum entah sebagai korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sesuai dengan peraturan yang ada ABH adalah anak yang telah berumur 12 tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dituduh dan diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut anak korban

⁷ Kartini-Kartono, **Psikologi Anak**, Mandar Maju, Bandung, 107-109.

⁸ Ibid.

⁹ F.J. Monks dkk, **Psikologi Perkembangan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, hlm. 35.

yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun untuk dapat memberikan keterangan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri.

Beberapa Asas-Asas Peradilan Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (pasal 2) :

a. Perlindungan

Asas ini bertujuan untuk melindungi anak dari segala gangguan baik fisik maupun nonfisik. Sebagai upaya memberikan perlindungan dan pengayoman demi menata masa depan anak yang masih panjang agar menjadi lebih baik.

b. Keadilan

Asas keadilan yang harus didapat oleh anak tersebut untuk penyelesaian suatu perkara yang terjadinya padanya. Sehingga dari munculnya rasa keadilan ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan anak. Tidak hanya dirasakan oleh anak sebagai pelaku saja ataupun anak korban, akan tetapi turut dirasakan oleh keluarga dan masyarakat.

c. Nondiskriminasi

Didalam penjelasan UU SPPA asas ini muncul karena didasari beraneka ragamnya ras, suku, bangsa, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, kondisi fisik maupun mental agar tidak terjadinya perbedaan dalam perlakuan terhadap anak. dengan berpegang teguh pada asas ini, anak dianggap sama dimata hukum.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Asas ini dikaitkan dengan pengambilan keputusan, semua keputusan terhadap anak harus mempertimbangkan yang terbaik bagi anak itu nantinya. Aspek ini bersifat mutlak dan penting adanya demi menjamin masa depan anak tersebut

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Aspek ini dikaitkan dengan segala sesuatu hal yang diutarakan oleh anak harus dihargai dan dihormati. Demi menjunjung tinggi hak-hak anak yang telah dimiliki oleh setiap anak, asas ini harus diterapkan.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Asas ini melekat pada setiap anak, karena terkait dengan setiap hak yang dimiliki oleh setiap anak yang dilindungi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah salah satu upaya untuk memberikan pelatihan bagi anak agar anak menjadi manusia yang berguna bagi negaranya, karena sesuai dengan peraturan hukum Indonesia anak adalah generasi penerus masa depan bangsa. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan bagi setiap aspek yang ada untuk menjaga tingkah laku dan sikap yang dimiliki oleh anak, agar tidak terjadinya penyimpangan didalamnya.

h. Proporsional

Asas proporsional adalah upaya yang dilakukan terhadap anak untuk tetap memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Sehingga menjadi acuan untuk memperlakukan anak sesuai batasannya saat berhadapan dengan hukum.

- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- UU SPPA telah menerangkan bahwa asas ini hadir untuk menghindarkan anak dari terampas kemerdekaannya, kecuali apabila terpaksa demi kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan
- Dalam UU SPPA menerangkan asas ini adalah upaya penekanan untuk menjauhkan anak dari prinsip menjatuhkan pembalasan tetapi lebih ditekankan sebagai proses kepentingan penyelesaian perkara.

1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana mengandung suatu keterkaitan antar sistem yang ada didalamnya dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang secara keseluruhan berusaha mengubah suatu masukan (input) yang buruk menjadi keluaran yang baik (output), berupa “tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang dari Sistem Peradilan Pidana.”¹⁰ Tujuan jangka pendek Sistem Peradilan Pidana yaitu pelaku tindak pidana untuk diresosialisasi, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana tersebut berlaku juga secara *mutatis mutandis* untuk tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Setya Wahyudi “Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana, tentunya memberi dampak besar kecil berlaku bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah pembinaan atau resosialisasi untuk dipersiapkan kembali kedalam

¹⁰Muladi, **Kapita Seketa Sistem Peradilan Pidana**, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. Vii.

masyarakat bagi pelaku anak. Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan jangka menengah yaitu untuk mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya”.¹¹

Meskipun tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengacu pada tujuan Sistem Peradilan Pidana pada umumnya, akan tetapi Gordon Bazemore menyebutkan bahwa “tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak bermacam-macam, sesuai dengan pandangan atau paradigma Sistem Peradilan Pidana Anak yang dianut. Ada tiga paradigma peradilan anak yaitu : paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, dan paradigma restoratif”.¹² Selain itu Tujuan dari Sistem peradilan anak di Indonesia juga mengadopsi dan mengacu pada Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice/SMRJJ) atau The Beijing Rules melalui Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, Paradigma Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention On The Rights of The Child) sesuai dengan Resolusi PBB No. 109 Tahun 1990 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak) Paradigma UU Perlindungan Anak, dan Paradigma Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini.

a. Paradigma Pembinaan Individual

¹¹Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 38.

¹²Paulus Hadisuprpto, **Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)**, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 143.

Apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana dengan paradigma pembinaan individual, lebih difokuskan kepada upaya perlindungan masyarakat secara langsung, dan tidak difungsikan bagian dari peradilan anak. Dalam bagian terpenting ini lebih ditekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada kerugian yang ditimbulkan.

Dalam penjatuhan sanksi Sistem Peradilan Pidana Anak ini dianggap tidak relevan dan tidak sesuai, karena pencapaian tujuan dilakukan dengan hanya melihat pelaku dapat menghindari pengaruh buruk dari lingkungan atau orang lain, pelaku mematuhi aturan, pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan.

Para pakar juga berpendapat, seperti yang diutarakan Setya Wahyudi yaitu "Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma individual yang dipentingkan adalah penekanan permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan atau kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab proses untuk memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan hukuman dalam sistem peradilan pidana anak dengan pemikiran atau paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara menyeluruh tidak layak.

Terpenuhinya sanksi lebih diunggulkan pada aspek atau hal-hal yang berhubungan dengan apakah pelaku untuk diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk indentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk meneliti masalah. Keadaan delinkuensi ditentukan untuk upaya pembinaan pelaku. Sehingga Pelaku dianggap tidak berkompeten dan tidak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan pihak

terkait. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapisitik”.¹³

b. Paradigma Retributif

Retributif sendiri bertujuan sebagai penjatuhan sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana anak pada saat anak menjalani suatu pidana. Ketika pelaku anak ini telah dilaksanakan proses eksekusi oleh Jaksa. Pada paradigma retributif ini tujuan yang diberikan dianggap berhasil apabila pelaku telah dijatuhi sanksi pidana dengan tepat, sesuai, pasti dan adil. Beberapa bentuk pemidanan dalam paradigma retributif berupa penangkapan, pengawasan elektronik, denda, fee dan sanksi punitif. Sebagai acuan dimensi ini adalah apabila pelaku telah ditahan, kemudian residivis berkurang melalui penahanan, dan dapat dikatakan sebagai suatu keberhasilan untuk melindungi masyarakat.

c. Paradigma Restoratif

Restoratif sebagai tujuan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak yang melibatkan pihak korban dan keluarga korban, pelaku, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Tujuan dalam sistem peradilan pidana anak paradigma restoratif ini dinyatakan berhasil apabila korban telah direstorasi, korban merasa puas mengenai penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku, pelaku sadar akan perbuatannya, korban mendapatkan ganti rugi sesuai dengan permintaan korban, dan lain sebagainya.

Peradilan restoratif sebagai tujuan untuk mencapai perlindungan masyarakat dan perlindungan individu dalam suatu sistem peradilan atau keadilan

¹³Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi....*, Loc. Cit

berbasis musyawarah (restorative justice). Yang dimana peradilan restoratif adalah “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang bersinggungan untuk bersama-sama mencari upaya penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan awal, dan bukan pembalasan.”¹⁴

Menurut penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan “keadilan restoratif landasan serangkaian proses diversi, adalah semua pihak yang turut serta dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama untuk mengatasi perkara yang ada sebagai upaya menciptakan suatu kewajiban untuk terpenuhinya sesuatu yang lebih baik dengan melibatkan anak, korban, dan masyarakat untuk menemukan suatu solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan”.

d. Paradigma Aturan-Aturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB tentang Administrasi Peradilan bagi Anak (*United Nations Standard Justice/SMRJJ*) atau (*The Beijing Rules*) melalui Adopted be General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985

Pada The Beijing Rules atau United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice/SMRJJ ditentukan dalam Rule 5.1. disebutkan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya” (*The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall*

¹⁴ Pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ensur that any rection to juvenile offenders shal always be in proportion to the circustances of both offenders and the offence).

Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan aspek substansial dalam sistem peradilan pidana anak. Menurut perspektif undang-undang sistem peradilan pidana anak identik sebagai mewujudkan kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga penjatuhan sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* bukan bersifat *primum remedium*. Dan tujuan kedua yang menekankan pada prinsip keseimbangan dan proporsionalitas, yaitu reaksi terhadap pelaku berusia dominan muda tidak hanya berdasarkan kepada pertimbangan beratnya tindak pidana, akan tetapi juga mempertimbangkan kondisi pribadi (individualisasi pidana), keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan, dan lain sebagainya.

e. Paradigma Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) sebagaimana Resolusi PBB No. 109 Tahun 1990 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Keppres No. 36 Tahun 1990) mengenai Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Sesuai paradigma ini, SPPA terdapat dalam uraian tentang standar-standar perlakuan terhadap “anak yang berhadapan dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*)” sebagaimana *Article 37. Article*

37Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) mengatur, bahwa:

1) Seorang anak tidak akan dikenai pidana atau penyiksaan dan tindakan lainnya yang tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat;

- 2) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan atau pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia dibawah 18 (delapan belas);
- 3) Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
- 4) Penangkapan, penahanan, dan sanksi pidana penjara hanya akan difungsikan sebagai penegakan dalam penyelesaian terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
- 5) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- 6) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak untuk melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
- 7) Setiap anak yang kemerdekaannya dirampas berhak menentang/melawan dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya dihadapan pengadilan atau aparat pihak berwenang dan tidak memihak, berhak memperoleh bantuan hukum, serta berhak untuk mendapatkan keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Dari penjelasan hak-hak konvensi anak diatas, tindak pidana anak harusnya mencerminkan hukum yang kuat yaitu berupa penjatuhan pidana secara profesionalitas, sepadan, sesuai, dan sifatnya berupa *ultimum remedium* bukannya bersifat *primum remedium*. Penekanan pada upaya prevensi/pencegahan dari sistem peradilan pidana untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menegaskan bahwa hukum pidana terhadap sistem pemidanaan menekankan asas *ultimum remedium*, suatu prinsip menghendaki hukum pidana

sebagai senjata akhir dari penegakan hukum pidana, yang implementasinya dilakukan dengan pendekatan non penal melalui prosedur *Out of Court Settlement* sesuai asas restorative justice.¹⁵

Dan pemidanaan dimaksudkan sebagai alternatif terakhir penghukuman suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain, *ultimum remedium* itu mensyaratkan terlebih dahulu pula upaya pemberian sanksi lain (non penal), berupa ganti rugi, denda, peringatan atau hal lainnya sebelum digunakannya sarana pidana berupa penjara (badan).¹⁶

f. Paradigma Undang-Undang Perlindungan Anak

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya ketentuan pasal 59, pasal 59 A dan pasal 64 ditentukan adanya pengaturan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan institusi negara lainnya bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
2. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

¹⁵Indriyanto Seno Adji, **Sistem Peradilan Pidana: Penyidikan & Keadilan Restoratif**, Makalah, Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta, 9 Januari 2013, hlm. 4

¹⁶Indriyanto Seno Adji, **Sistem Peradilan Pidana**..., Ibid, hlm. 10

- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Berikutnya ketentuan Pasal 59 A berbunyi sebagai berikut:

Perlindungan khusus terhadap anak sesuai yang tertuang dengan jelas dalam pasal 59 ayat (1) dapat melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk rehabilitasi dan/atau pengobatan secara psikis, fisik, dan sosial, serta gangguan kesehatan lainnya dan pencegahan penyakit;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Kemudian ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak yang hampir identik dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak menyebutkan:

Perlindungan khusus untuk anak yang berperkara dan bermasalah dengan hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabatnya dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu singkat;
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang objektif, dan tidak memihak;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;

- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Paradigma UU SPP Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa yang disingkat UU SPPA berbanding terbalik untuk kepentingan terbaik bagi anak. Anak memiliki peran strategis sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “ negara menjamin hak setiap anak untuk berkembang, tumbuh, dan atas kelangsungan hidup serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak merupakan organ penting dalam perkembangan suatu negara, karena semata anak merupakan generasi penerus bangsa berikutnya, sehingga dari pengertian tersebut keberadaan anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif arus globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan pembangunan, serta perubahan gaya hidup dan pola hidup hampir banyak orang tua yang telah memberi dampak perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan sosial yang sangat memengaruhi sikap dan nilai anak. Maka dari itu memang diperlukan adanya prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang harus berdasarkan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagai suatu acuannya sebagaimana Resolusi PBB No. 109 Tahun 1990 mengenai Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Tujuan Sistem Peradilan Pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak

berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dan oleh sebab itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan terhadap suatu pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

B. Persyaratan Diversi dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana mengatur bahwa “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.” Ide diversi dituliskan dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB tentang Administrasi Peradilan bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice/SMRJJ*) atau *the Beijing Rules* melalui Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, dimana diversi (diversion) tercantum dalam rule 11.1, rule 11.2 dan rule 17.4.

Berdasarkan United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), diversi adalah “langkah untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal diantaranya tidak meneruskan/melepaskan atau menghentikan dari proses peradilan pidana dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dan macam-macam kegiatan pelayanan sosial lainnya”. Penerapan

diversi dapat dilakukan didalam semua tingkatan-tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁷

Dari titik tolak konteks diatas, manfaat pelaksanaan program diversi bagi pelaku anak, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin;
2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban, dan masyarakat;
3. Kerjasama dengan pihak orangtua, pengasuh, dan diberi nasehat hidup sehari-hari;
4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab;
5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban;
6. Memberikan pelajaran mengenai kesempatan untuk melihat efek dan akibat yang ditimbulkan dari kasus tersebut dan memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya;
7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan;
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara;
9. Pengendalian kejahatan anak/remaja.¹⁸

Adapun tujuan diversi “berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses

¹⁷ Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary (Sixth Edition), St. Paul Minn West Publishing Co, 1990, hlm. 447, dalam; Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi..., Op. Cit, hlm. 56

¹⁸ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi..., Ibid., hlm. 60.

peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak” (pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana).

Syarat dilakukan diversi sebagaimana ketentuan Pasal 7, Pasal 9 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 “dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dan adanya kesediaan anak dan keluarganya”.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dapat dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Musyawarah dalam diversi bisa melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya, dalam melakukan diversi hendaknya harus mempertimbangkan tentang kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapak dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kemudian syarat kesepakatan diversi ada 2 (dua) dua kemungkinan, yaitu:

a. Mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil dari konteks ini dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali pada orangtua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.

b. Tidak harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya untuk nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat atau tindak pidana tanpa korban, tindak pidana ringan, dan pelanggaran biasa. Terhadap aspek ini, kesepakatan diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kemudian kesepakatan diversi bentuknya dapat berupa pengembalian kerugian kepada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan kewenangan melakukan diversi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, perkara anak di Pengadilan, yang akan diterangkan sebagai berikut ini:

a. Diversi Pada Tahap Penyidikan

Ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak menyebutkan “pada setiap tingkat pemeriksaan, penuntutan, dan penyidikan perkara anak di Pengadilan Negeri/PN wajib diupayakan diversi”. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya wajib dilakukan diversi pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan pasal 7, pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun proses dan tata cara diversi yang dilakukan ditingkat penyidikan sebagai berikut:

1. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat laporan polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (Bapas);
2. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib dilimpahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah permintaan penyidik diterima;
3. Penyidik wajib memulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi;
4. Apabila pelaku atau korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas, dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi dan penyidik membuat berita acara proses diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau

dilakukan diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum;

5. Apabila diversi berhasil dimana para pihak telah mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaannya ke Pengadilan Negeri atau PN berdasarkan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak kesepakatan berhasil untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 x 24 jam dimulai saat diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak ditetapkan setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan;
6. Apabila diversi gagal, penyidik membuat berita acara diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan memproses perkara untuk dilanjutkan ke penuntut umum dengan dilampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan/Bapas.

b. Diversi Pada Tahap Penuntutan

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya wajib dilakukan diversi pada tingkat penuntutan yang diatur dalam ketentuan pasal 7, pasal 42 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana.

1. Berkas yang diterima dari kepolisisan, penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara yang diterimanya, sesuai dengan hasil

penelitian kemasyarakatan (litmas) yang telah dibuat oleh Bapas serta kendala yang menghambat proses diversi pada tingkat penyidikan;

2. Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya proses diversi;
3. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka penuntut umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas, dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi dan penuntut umum membuat berita acara proses diversi. Jika pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi, penuntutan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan, berita acara proses diversi dan perkara dilimpahkan ke peradilan anak;
4. Dalam hal proses diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pihak yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri atau PN berdasarkan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak menemui titik temu kesepakatan agar memperoleh penetapan. Kemudian pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu maksimal 3 x 24 jam dimulai saat diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan

kepada Pembimbing Kemasyarakatan, hakim, atau penuntut umum dalam waktu maksimal 3 x 24 jam sejak ditetapkan. Setelah menerimanya penetapan tersebut penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan;

5. Dalam hal ini diversi gagal maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

c. **Diversi Pada Tahap Pengadilan**

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukan upaya diversi pada tingkat pemeriksaan disidang anak (tahap pengadilan) diatur dalam ketentuan pasal 7, pasal 14, pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi yang dilakukan ditingkat pemeriksaan disidang pengadilan anak, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Setelah menerima berkas perkara dari penntut umum, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim anak atau majelis hakim anak untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara;
2. Harus diupayakan diversi terlebih dahulu oleh Hakim paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. "Pada praktik peradilan, yang melakukan diversi disebut sebagai fasilitator diversi yakni hakim anak yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan" (Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014). Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan

melibatkan pihak-pihak terkait dan dilakukan untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restoratif;

3. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukannya proses diversi maka hakim anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas, dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses diversi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan diawali adanya penetapan hakim anak/majelis hakim anak tentang “Penetapan Hari Diversi” dan proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri dan kemudian dibuatkan Berita Acara Proses Diversi, baik berhasil maupun yang gagal sebagaimana lampiran I, II, III, IV Perma Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014.

4. Dalam hal proses diversi dinyatakan berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu maksimal 3 x 24 jam terhitung saat diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan dan hakim anak yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan (Lampiran V, VI, VII Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014);

5. Apabila diversi gagal, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya hakim anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak.

C. Persyaratan Diversi dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

Didalam hukum ketatanegaraan dan sistem peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) dapat disebutkan memiliki beberapa fungsi. Diantaranya adalah sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap kekurangan hukum yang dimana ketentuan perundang-undangan belum mengaturnya sehingga Perma RI dapat bersifat pelengkap peraturan perundang-undangan, dan sebagai penemuan hukum-hukum baru.

Perma RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hakikatnya lahir, tumbuh, dan berkembang sebagai fungsi memenuhi kekosongan dan penegakan hukum dalam konteks praktik penyelenggaraan pemerintahan dan sistem Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya secara substansial Perma RI Nomor 4 Tahun 2014 terdiri dari V Bab mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban diversi, Pelaksanaan Diversi di Pengadilan, ketentuan peralihan dan Ketentuan Penutup.

Sesuai dengan fungsinya untuk untuk memenuhi kekosongan dan penegakan hukum seperti yang telah dituliskan diatas, untuk praktik penyelenggaraan pemerintah dan sistem Perundang-undangan berdasarkan konsiderans menimbang huruf b Perma RI Nomor 4 Tahun 2014 disebutkan

bahwa “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat UU No. 11 Tahun 2012 belum mengatur secara jelas mengenai tata cara dan tahapan diversi.

Tedapat beberapa hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kemudian diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014, sebagai fungsi Perma untuk memenuhi kekosongan hukum dan penegakan hukum, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pengertian musyawarah diversi sebagai musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restoratif. Kemudian fasilitator diversi adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Kaukus merupakan pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Berikutnya kesepakatan diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi, dan hari adalah hari kerja.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ditentukan bahwa “Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan, subsadairitas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)".

D. Pengaturan yang Terkait dengan Persyaratan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

1. Hukum Perlindungan Anak

Hukum Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002, dengan segala pertimbangan berbagai aspek. Dalam penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak secara umum dikatakan, "Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat martabat, harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi". Segala aturan terkait dengan hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dengan segala upaya serta usaha aspek tersebut demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan harus sesuai dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, rohani, maupun sosial. Upaya perlindungan anak ini dilakukan semenjak janin dalam kandungan dan sampai anak berumur delapan belas (18) tahun.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak meliputi:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan didasari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 NKRI dan prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

a. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembeda apapun. Prinsip ini ada didalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak Ayat (1), “Negara-Negara pihak menghormati serta melindungi hak-hak yang telah diputuskan pada konvensi ini untuk setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, tanpa memandang bahasa, jenis kelamin, warna kulit, ras, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, kelahiran, cacat atau tidak atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtua walinya yang sah”. Ayat (2) berbunyi bahwa “Negara-negara pihak akan mengambil semua proses yang perlu untuk melindungi anak dari semua perbedaan atau hukuman yang didasarkan pada kegiatan, status, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yaitu “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Dalam prinsip ini

menjelaskan bahwa kepentingan terhadap anak sangat diutamakan, sehingga pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan keputusan menyangkut masa depan anak itu sendiri, belum tentu apa yang telah diputuskan oleh orang dewasa baik bagi si anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan hidup, dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak ayat (1) yaitu “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”. Dalam prinsip ini menjelaskan bahwa pemerintah atau negara harus menjamin setiap hak anak yang ada pada dirinya, sehingga terjaminnya kelangsungan hidup bagi si anak dalam rangka menjalankan kehidupan sosial. Maka dari itu pemerintah harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak: “Negara-negara pihak akan melindungi anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri mendapat hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”. Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa anak memiliki hak khusus untuk mengutarakan segala apa yang anak itu inginkan, sehingga anak tidak selalu dipandang sebagai sisi yang lemah.

Dapat disimpulkan bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan yang ada dengan menempatkan posisi anak

sebagai peran yang utama dan pertama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang utama.¹⁹

Pasal 3 menjelaskan bahwa “Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, hidup, dan ikut serta secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari perbedaan dan kekerasan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berakhlak mulia, berkualitas, dan sejahtera.

2. Hukum Kesejahteraan Anak

Hukum Kesejahteraan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 secara umum dikatakan bahwa “suatu bangsa untuk mengurus dan membangun rumah tangganya harus mampu membina dan membentuk suatu tata penghidupan serta kepribadiannya”. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat upaya dan usaha untuk terus-menerus, dari generasi ke generasi berikutnya untuk memiliki dan menghayati filsafah hidup bangsa, maka diperlukan kesediaan, kehendak, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Maksud dari hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 adalah untuk mensejahterakan anak, yang dimana anak adalah generasi penerus bangsa berikutnya. Oleh karenanya anak baik secara jasmani, rohani, maupun sosial sebelum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, penjaminan, dan pengamanan kepentingan

¹⁹“UN Convention on the Right of the Child; AN International Save the Children Alliance Training Kit”, hlm. 75 dan Hadi Supeno, ibid... hlm. 63.

anak ini selayaknya dilakukan oleh orang tua, pengasuh, dan pihak-pihak yang terkait dengan itu yang harus diawasi oleh negara.

Apabila memang tidak ada pihak-pihak yang mampu melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab negara.

Disamping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, didalam lingkungan sosial bermasyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan jasmani, rohani, dan sosial ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu: “anak-anak yang tidak mampu, anak-anak terlantar, anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani”. Sejalan dengan itu tujuan undang-undang ini, maka undang-undang ini mengurangi dan atau mengubah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.²⁰

Hak-hak Anak menurut Undang-Undang meliputi:

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengatur hak-hak anak yang keberadaannya merupakan mutlak adanya, sehingga dari pengaturan hak-hak itu diharapkan agar anak memperoleh kesejahteraan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menyatakan “(1) Anak berhak atas bimbingan, asuhan, perawatan dan kesejahteraan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

(2) “Anak berhak atas pelayanan sebagai upaya kehidupan sosialnya dan mengembangkan kemampuannya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.” (3) “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun

²⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang **Kesejahteraan Anak**.

sesudah dilahirkan.” (4) “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar dan dapat membahayakan.”²¹ “Pasal 3 dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat bantuan, pertolongan, dan perlindungan.”²²

“Pasal 4 (1) Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.” (2) “Pelaksanaan ketentuan Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” Pasal 5 (1) “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.” (2) “Pelaksanaan ketentuan Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” Pasal 6 (1) “Anak yang mendapatkan masalah kelakuan diberi asuhan dan pelayanan yang bertujuan membantunya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya.” (2) “Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat (1), juga dijatuhkan bagi anak yang telah diputus bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan vonis hakim.” Pasal 7 “Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.” Pasal 8 “Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.” (Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak)

²¹ Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) yang dimaksudkan dengan pelayanan antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan. Penjelasan Ayat (4) yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan sosial.

²² Penjelasan Pasal 3 yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pemerintah dituntut untuk memiliki suatu kewajiban mengembangkan sistem nasional kesejahteraan dan perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, peraturan yang dibuat yaitu Perundang-undangan, program dan strategi yang sesuai dengan kewajiban negara dalam konvensi tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu perwujudan kewajiban negara dalam melaksanakan suatu hubungan dan sistem secara yuridis sebagai konsekuensi dari ratifikasi Hukum Internasional.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perspektif normatif adalah apakah ketentuan Perma tentang diversi bertentangan atau lebih luas pengaturannya, apabila dibandingkan dengan UU SPPA. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur diversi dapat diartikan sebagai alternatif upaya untuk mencegah apabila anak dihambat atau adanya upaya untuk menghilangkan anak untuk melakukan diversi. Sehingga kehadiran Perma yang tertuang dalam Pasal 3 tersebut untuk menyempurnakan aturan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA. Dan dapat disimpulkan bahwa kedua aturan terkait Persyaratan diversi baik Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun dan Pasal 7 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 saling melengkapi, dan dimana Perma mengatur lebih tegas untuk melakukan upaya diversi baik ancaman pidananya diatas dan/atau dibawah 7 (tujuh) tahun wajib dilakukan diversi.
2. Dalam hal ini pembentuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengedepankan prinsip perlindungan anak, karena Undang-Undang ini telah bersikap diskriminatif yaitu dengan cara membeda-bedakan perlakuan dalam hal menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Padahal demi kepentingan terbaik bagi anak, asas keadilan dan kemanfaatan hukum hendaknya diversi tidak dilakukan pembatasan hanya

untuk tindak pidana ancaman sanksi pidana penjaranya kurang dari 7 (tujuh) tahun, akan tetapi semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak berapapun masa pidana penjaranya tetap dilakukan diversi. Kehadiran Perma inilah yang menepis kemungkinan sikap diskriminatif tersebut dengan munculnya aturan-aturan penyempurna UU SPPA, sehingga tetap mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak.

B. Saran

Saran dari penulis seharusnya pembentuk UU SPPA tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak yang berlandaskan dengan asas keadilan, dan kemanfaatan hukum hendaknya diversi tidak dilakukan pembatasan hanya untuk tindak pidana dibawah tujuh tahun, akan tetapi hendaknya terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap dilakukan diversi. Dan sepanjang para pihak setuju melakukan diversi, harus difasilitasi dan hendaknya peradilan atau keadilan berbasis musyawarah (restorative justice).